PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

PERIODE 30 JUNI 2025

DIPA 005.01.401199



Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telp. 0274-552997
email : admin@pa-yogyakarta.net

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu entitas di bawah Mahkamah Agung yang juga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Sekretaris,

Taslim, S.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI.	Lampiran dan Daftar	57

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
JL. Ipda Tut Harsono No.53, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta
TELEPON 0274 552997, email : admin@pa-yogyakarta.net

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Sekretaris,

Taslim, S.H.
NIP 197001231995031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Semester 1 Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.122.984,- atau mencapai 105.15 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.970.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester 1 TA. 2025 adalah sebesar Rp.6.315.287.344,- atau mencapai 64,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.9.820.613.000,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.48.572.161.735,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.32.684.675,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.48.539.477.060,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.660.995.815,- dan Rp.47.911.165.920,-

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.1.484.904,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.6.925.273.479,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(6.923.788.575,-). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(6.931.989.695,-).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.48.472.985.255,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(6.931.989.695,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.6.370.170.360,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.47.911.165.920,-.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester 1 Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Cat	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.970.000	3.122.984	152.984	105,15	1.484.904
Jumlah Pendapatan dan Hibah		**2.970.000**	**3.122.984**	**152.984**	**105,15**	**1.484.904**
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.2	8.310.178.000	5.431.853.789	(2.878.324.211)	65,36	4.934.213.223
Belanja Barang	B.2	1.309.935.000	682.945.015	(626.989.985)	52,14	715.076.874
Belanja Modal	B.2	200.500.000	200.488.540	(11.460)	99,99	0
Jumlah Belanja		**9.820.613.000**	**6.315.287.344**	**(3.505.325.656)**	**64,31**	**5.649.290.097**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NERACA

PER 30 JUNI 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	12.684.675	12.522.900
Jumlah Aset Lancar		**32.684.675**	**12.522.900**
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	43.029.069.000	43.029.069.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.864.756.538	3.668.761.998
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.372.977.000	6.310.477.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	26.168.479	26.168.479
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.753.493.957)	(4.577.694.464)
Jumlah Aset Tetap		**48.539.477.060**	**48.456.782.013**
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET LAINNYA	C.4		
Dana yang dibatasi penggunaannya			16.000.000
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	103.475.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	(93.636.300)
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**25.839.200**
JUMLAH ASET		**48.572.161.735**	**48.495.144.113**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.5**		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	20.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	630.841.254	22.158.858
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.4	10.154.561	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**660.995.815**	**22.158.858**
JUMLAH KEWAJIBAN		**660.995.815**	**22.158.858**
EKUITAS	**C.6**	-	
Ekuitas	C.6.1	47.911.165.920	48.472.985.255
JUMLAH EKUITAS		**47.911.165.920**	**48.472.985.255**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.484.904	1.732.388
JUMLAH PENDAPATAN		**1.484.904**	**1.732.388**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.031.107.020	5.523.058.074
Beban Persediaan	D.3	7.964.450	8.640.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	435.818.429	457.576.147
Beban Pemeliharaan	D.5	269.953.007	258.422.984
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.631.080	15.102.100
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	175.799.493	171.623.439
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**6.925.273.479**	6.434.423.344
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(6.923.788.575)**	**(6.432.690.956)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset		(8.201.200)	-
Pendapatan Pelepasan Aset		1.638.000	-
Beban Pelepasan Aset		9.839.200	-
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya		-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.201.120)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(6.931.989.695)**	**(6.432.690.956)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	48.472.985.255	48.776.150.157
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.931.989.695)	(6.432.690.956)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.370.170.360	5.657.555.193
EKUITAS AKHIR	E.5	**47.911.165.920**	**48.001.014.394**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Agama Yogyakarta didirikan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berada di bawah Mahkamah Agung RI. Entitas berkedudukan di Jl. Ipda Tut harsono No. 53, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Yogyakarta berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung"** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya :

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
  c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.820.613.000,-. Selama Semester 1 tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi. Adapun perubahan tersebut :

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 10 Januari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK yaitu pergeseran akun untuk pembayaran tunjangan Hakim dari akun 511124 Tunjangan Fungsional PNS menjadi 511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dan pergeseran akun untuk pembayaran PPh 21 dari akun 511125 Tunjangan PPh PNS menjadi 511324 PPh Pejabat Negara.
2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan pemblokiran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211 dikarenakan adanya efisiensi anggaran secara nasional.
3. Revisi Ke-03 pada tanggal 28 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
4. Revisi Ke-04 pada tanggal 23 Maret 2025 dikarenakan adanya pembukaan blokir efisiensi anggaran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211.
5. Revisi Ke-05 pada tanggal 21 April 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
(Revisi Ke-05)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	2.970.000	2.970.000
Jumlah Pendapatan	**2.970.000**	**2.970.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	8.310.178.000	8.310.178.000
Belanja Barang	1.309.935.000	1.309.935.000
Belanja Modal	200.500.000	200.500.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**9.820.613.000**	**9.820.613.000**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.3.122.984,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.3.122.984,- atau mencapai 105,15 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.2.970.000,-.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI No. 417/BUA.3/KU1.4/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan Penggunaan Kodefikasi Segmen Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/ Negara dan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung No. 424/BUA.3/KU1.1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Instruksi Perubahan Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/ Negara dimana terjadi perubahan akun penyetoran dari akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi mulai dari Januari 2025.

Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2025 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	742.452	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.638.000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.970.000	742.452	25
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	80	-
Jumlah	**2.970.000**	**3.122.984**	**105,15**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester 1 TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 110,32 persen dibandingkan Semester 1 TA 2024. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan lain selain dari pendapatan sewa rumah dinas, yaitu:

1. Adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin berupa Mesin Antrian, UPS, Kursi Besi/ Metal, lemari Kayu, Televisi dan PC sebesar Rp. 1.638.000,-
2. Adanya Penerimaan Kembali Belanja tahun yang lalu berupa pengembalian akun pembulatan akibat kekurangan gaji sebesar Rp. 80,-

Selain itu, belum dilakukan koreksi akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk bulan Februari, Maret dan April 2025 oleh Bendahara Pengadilan Agama Yogyakarta.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	742.452	1.484.904	(50)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.638.000	-	100
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	742.452	-	100
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	80	-	100
Jumlah	**3.122.984**	**1.484.904**	**110,32**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Rp.6.315.287.344,-

Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pada Semester 1 TA 2025 adalah sebesar Rp.6.315.287.344,- atau 64,31% dari anggaran belanja sebesar Rp.9.820.613.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester 1 TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Semester 1 TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.310.178.000	5.431.854.112	65,36
Belanja Barang	1.309.935.000	682.945.015	52,14
Belanja Modal	200.500.000	200.488.540	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**9.820.613.000**	**6.315.287.667**	**64,31**
Pengembalian Belanja	-	323	-
Jumlah	**9.820.613.000**	**6.315.287.344**	**64,31**

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 11,79 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai sebesar 10,09% dikarenakan :
   - Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 7 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
   - Adanya Kenaikan Pangkat (KP) sebanyak 4 pegawai dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Pensiun sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
   - Adanya Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
   - Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai Juni 2025
   - Adanya Kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 pegawai
   - Pembayaran Gaji ke-14 serta THR Tahun 2025 telah direalisasikan semua pada Semester I ini.
2. Menurunnya Belanja Barang sebesar 4,49% dikarenakan :
   - Menurunnya belanja sewa untuk rumah dinas Hakim dikarenakan adanya Hakim yang mutasi keluar dan pensiun sehingga pagu belanja sewa belum dapat direalisasikan maksimal
   - Menurunnya biaya perjalanan akibat adanya efisiensi anggaran sehingga 50% dari pagu perjalan dinas masih di blokir hingga saat ini
   - Belum maksimalnya belanja persediaan ATK di semester 1 ini
3. Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp.200.500.000,- terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.138.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.62.500.000,-

4. Adanya pengembalian belanja sebesar Rp.323,- berupa belanja pembulatan gaji.

Perbandingan Realisasi Belanja
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	5.431.853.789	4.934.213.223	10,09
Belanja Barang	682.945.015	715.076.874	(4,49)
Belanja Modal	200.488.540	-	100
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**6.315.287.344**	**5.649.290.097**	**11,79**

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.5.431.853.789,-

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.431.853.789,- dan Rp.4.934.213.223,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Semester 1 Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,09% dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 7 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
2. Adanya Kenaikan Pangkat (KP) sebanyak 4 pegawai dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Pensiun sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
3. Adanya Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Juni 2025
4. Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai Juni 2025
5. Adanya Kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 pegawai
6. Pembayaran Gaji ke-14 serta THR Tahun 2025 telah direalisasikan semua pada Semester I ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.904.031.000	1.817.197.640	4,78
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.297	22.778	6,67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	131.922.130	124.190.816	6,23
Beban Tunj. Anak PNS	33.407.858	34.205.432	(2,33)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.720.000	19.260.000	(2,8)
Beban Tunj. Fungsional PNS	88.706.000	2.259.190.000	(96,07)
Beban Tunj. PPh PNS	19.664.893	425.822.493	(95,38)
Beban Tunj. Beras PNS	80.820.720	75.823.740	6,59
Beban Uang Makan PNS	182.680.000	160.637.000	13,72
Beban Tunjangan Umum PNS	26.960.000	17.865.000	33,74
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	519.017.214	-	100
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	2.425.900.000	-	100
Total Belanja Kotor	**5.431.854.112**	**4.934.214.899**	**10,09**
Pengembalian Belanja	**323**	**1.676**	**-**
Jumlah Belanja	**5.431.853.789**	**4.934.213.223**	**10,09**

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Meningkatnya beban Gaji Pokok PNS, beban Pembulatan Gaji PNS, beban Tunjangan Suami/ Istri PNS dikarenakan adanya Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Pangkat, KGB dan penambahan CPNS.
2. Menurunnya beban Tunjangan Anak PNS sebesar 2,33% dikarenakan anak telah lulus kuliah atau usia anak telah mencapai batas 25 tahun sehingga tidak lagi menjadi tanggungan pegawai.
3. Menurunnya beban Tunjangan Struktural sebesar 2,8% dikarenakan terdapat 1 Jabatan struktural yang kosong sejak bulan februari 2024 yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang telah pensiun pada Januari 2024 dan belum ada penggantinya hingga saat ini.
4. Menurunnya beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar 96,07% dikarenakan adanya pergeseran pembayaran tunjangan jabatan Hakim yang semula pada akun belanja Tunj. Fungsional PNS menjadi akun belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara.
5. Menurunnya beban Tunjangan PPh PNS sebesar 95,38% dikarenakan adanya pergeseran pembayaran tunjangan PPh Hakim yang semula pada akun belanja Tunj. PPh PNS menjadi akun belanja Tunj. PPh Pejabat Negara.
6. Meningkatnya beban Tunjangan Umum PNS dikarenakan adanya penambahan CPNS sebanyak 3 pegawai.

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.682.945.015,-

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.682.945.015,- dan Rp. 715.076.874,-

Realisasi Belanja Barang Semester 1 TA 2025 mengalami penurunan sebesar 4,49% dari Realisasi Belanja Barang Semester 1 TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Menurunnya belanja Jasa sebesar 32,36% berupa belanja sewa rumah dinas Hakim dikarenakan adanya Hakim yang mutasi keluar dan pensiun sehingga pagu belanja sewa belum dapat direalisasikan maksimal.
2. Menurunnya biaya perjalanan dinas sebesar 69,33% dikarenakan adanya efisiensi anggaran secara nasional sehingga 50% dari pagu perjalanan dinas masih di blokir hingga saat ini.
3. Belum maksimalnya belanja persediaan ATK dan belanja pemeliharaan gedung bangunan di semester 1 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	321.422.833	296.957.925	8,24
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Persediaan	11.840.200	18.188.400	(34,90)
Belanja Jasa	88.066.431	130.193.965	(32,36)
Belanja Pemeliharaan	256.984.471	254.634.484	(0,92)
Belanja Perjalanan Dinas	4.631.080	15.102.100	(69,33)
Jumlah Belanja Kotor	**682.945.015**	**715.076.874**	**(4,49)**
Pengembalian Belanja Barang	-	-	**-**
Jumlah Belanja	**682.945.015**	**715.076.874**	**(4,49)**

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal Rp.200.488.540,-

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp.200.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.138.000.000,-
2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.62.500.000,-

Semester I Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh pengelolaan belanja modal tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	**137.988.540**	**-**	**137.988.540**	**100**
Belanja Modal Penambahan Gedung dan Bangunan	**62.500.000**	**-**	**62.500.000**	**100**
Total Belanja Kotor	**200.488.540**	**-**	**200.488.540**	**100**
Pengembalian Belanja	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah Belanja	**200.488.540**	**-**	**200.488.540**	**100**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester 1 TA 2025 dan Semester I TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Tanah/ Pengadaan Tanah pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari kurun waktu Tahun 2025 dan 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.137.988.540,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester 1 TA 2025 adalah sebesar Rp.137.988.540,- dimana Nilai tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan dengan

realisasi Semester 1 TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin pada Tahun 2024. Belanja Modal Peralatan dan mesin pada tahun 2025 berupa peralatan kantor terdiri dari : CCTV sebanyak 1 Paket; AC Split 2 PK sebanyak 5 Unit; AC Split 1 PK sebanyak 6 Unit; AC Standing sebanyak 1 Unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semester I TA. 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Laptop	-	-	-
Peralatan Kantor	*137.988.540*	-	-
Pengolah Data	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	***137.988.540***	***-***	***100***
Pengembalian	***-***	***-***	***-***
Jumlah	***137.988.540***	***-***	***100***

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.62.500.000,-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester 1 TA 2025 dan Semester I TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.62.500.000,- dan Rp.0,-

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yaitu Pengadaan Pintu Otomatis Ruang Sidang sebanyak 2 Unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semester II TA. 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Penambahan nilai gedung dan bangunan	*62.500.000*	-	-
Jumlah Belanja Kotor	***62.500.000***	***-***	***100***
Pengembalian	***-***	***-***	***-***
Jumlah	***62.500.000***	***-***	***100***

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari kurun waktu Tahun 2024 dan 2025.

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester 1 TA 2025 dan Semester I TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401199 (DIPA 01) tidak menyelenggarakan pengelolaan belanja bantuan sosial di Semester 1 tahun 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp.32.684.675,-

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.32.684.675,- dan Rp. 12.522.900,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.20.000.000,-

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/ TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.0,-

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0,-

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Setiap uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Yogyakarta disetorkan langsung ke kas negara secara rutin dan berkala dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak memiliki akun rekening di Bank.

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp.0,-

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	**0**	0	**0**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	**0**	0	**0**
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	**0**	**0**	**0**

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka Rp.0,-

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Dibayar di Muka
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Nihil	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0.-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.10. Persediaan

Persediaan Rp.12.684.675,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.12.684.675,- dan Rp.12.522.900,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	9.959.450	10.085.900
Barang untuk Pemerliharaan	2.725.225	2.437.000
Suku Cadang	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**12.684.675**	**12.522.900**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp.48.539.477.060,-

Saldo Aset Tetap Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp.48.539.477.060,- dan Rp.48.456.782.013,-

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp.43.029.069.000,-

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.43.029.069.000,- dan Rp.43.029.069.000,-.

Tidak terdapat mutasi / perubahan pada nilai aset tetap Tanah. Adapun Rincian Tanah per 30 Juni 2025 sebagai berikut :

Rincian Aset Tanah TA. 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.1)	150 M2	13.05.13.04.00818	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	885.327.000
2.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.2)	775 M2	13.05.13.05.01204	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	4.297.675.000
3.	Tanah Bangunan Gedung Kantor (KIB. 1)	1.860 M2	13.05.13.02.01077	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	19.233.247.000
4.	Tanah Bangunan Gedung Kantor (KIB.2)	1.800 M2	13.05.13.02.01076	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	18.612.820.000
					Jumlah	**43.029.069.000**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp.3.864.756.538,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.3.864.756.538,- dan Rp.3.668.761.998,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.668.761.998
Mutasi Tambah :	
Pembelian	137.988.540
Hibah Barang	58.006.000
Transfer Masuk	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	**3.864.756.538**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(3.480.103.644)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**384.652.894**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp.137.988.540,- berupa peralatan kantor terdiri dari :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
AC 2 PK	5	59.995.500
AC 1 PK	6	38.997.630
AC Standing	1	26.996.310
CCTV	1	11.999.100
Total		**137.988.540**

2. Hibah Langsung berbentuk barang sesuai dengan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS No.BA-35/KPN.1501/2025 dan SP3HL-BJS Nomor: 275/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 dari PT. Media Sarana Data sebesar Rp.58.006.000,- berupa alat pengolah data terdiri dari :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
Mini PC (Personal Computer	1	2.405.000
PC (Personal Computer)	2	22.100.000
Tablet	3	17.355.000
Televisi	2	16.146.000
Total		**58.006.000**

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp.6.372.977.000,-

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.6.372.977.000,- dan Rp.6.310.477.000,-

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran belanja Modal Penambahan Gedung dan Bangunan berupa Pembuatan Pintu Otomatis Ruang sidang sebanyak 2 unit sebesar Rp. 62.500.000,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6.310.477.000
Mutasi Tambah :	0
Pembelian	62.500.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2025	**6.372.977.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(1.273.390.313)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**5.099.586.687**

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,-

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . Tidak terdapat mutasi / perubahan pada nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Berdasarkan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, Mahkamah Agung dan satker di bawahnya tidak mengelola jalan, irigasi dan jaringan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.26.168.479,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.26.168.479,- dan Rp.26.168.479,-. Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya per 30 Juni 2025 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	26.168.479
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2025	**26.168.479**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**26.168.479**

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada satker Pengadilan Agama Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2024 dan 2025.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp.4.753.493.957,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar (Rp.4.753.493.957,-) dan (Rp.4.577.694.464,-)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	*Peralatan dan Mesin*	*3.864.756.538*	*(3.480.103.644)*	*384.652.894*
2	*Gedung dan Bangunan*	*6.372.977.000*	*(1.273.390.313)*	*5.099.586.687*
3	*Jalan, Irigasi dan Jaringan*	*-*	*-*	*-*
4	*Aset Tetap Lainnya*	*26.168.479*	*-*	*26.168.479*
Akumulasi Penyusutan		***10.263.902.017***	***(4.753.493.957)***	***5.510.408.060***

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp.0,-

Piutang Jangka Panjang Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp.0,-

Saldo Aset Lainnya Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.25.839.200,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lainnya berupa :

1. Dana yang dibatasi penggunaannya yaitu tagihan langganan internet bulan Desember 2024 senilai Rp.16.000.000,- yang dibayarkan menggunakan

mekanisme RPATA setelah berakhirnya masa kontrak di 31 Desember 2024. Pembayaran telah dilaksanakan pada awal Januari 2025.

2. Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp.103.475.500,- . Telah dilaksanakan lelang untuk barang-barang tersebut pada bulan Maret 2025.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0,-

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Rp.0,-

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.103.475.500,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**103.475.500**
Mutasi Tambah :	
Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	103.475.500
Saldo per 30 Juni 2025	**0**

Mutasi transaksi pengurangan pada Aset Lain-lain merupakan barang milik negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan telah dilakukan proses penghapusan dan lelang barang pada bulan Maret 2025 senilai Rp.103.475.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Unit Lemari Kayu senilai Rp.14.000,- ;
- 1 Unit Mesin Antrian senilai Rp. 27.496.000,- ;
- 1 Unit Kursi Besi/ Metal senilai Rp.577.500,- ;
- 3 Unit Televisi senilai Rp. 28.300.000,- ;
- 2 Unit UPS senilai Rp. 5.068.000,- ;
- 4 Unit Personal Computer senilai Rp. 42.020.000,-

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan (Rp.93.636.300,-)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Pada tahun 2025, terjadi pengurangan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dikarenakan telah selesainya proses penghapusan BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp.660.995.815,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Agama Yogyakarta per 3 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.660.995.815,- dan Rp.22.158.858,-

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

1. Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.630.841.254,- merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Gaji Induk Pegawai bulan Juli 2025 sebesar Rp.605.266.254,- dan Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Honor PPNPN bulan Juni 2025 sebesar Rp.25.575.000,-.
2. Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp.10.154.561,- merupakan Kuitansi GUP yang belum di SPM-kan.
3. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp.20.000.000,- merupakan sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan.

Tabel Rincian Kas Kewajiban Jangka Pendek
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	630.841.254	22.158.858
Utang yang belum ditagihkan	10.154.561	-
Uang Muka dari KPPN	20.000.000	-
Jumlah	**660.995.815**	**22.158.858**

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp20.000.000,-

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.630.841.254,-

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.630.841.254,- dan Rp.22.158.858,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.630.841.254,- merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Gaji Induk Pegawai bulan Juli 2025 sebesar Rp.605.266.254,- dan Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Honor PPNPN bulan Juni 2025 sebesar Rp.25.575.000,-.

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0,-

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0,-

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.6. Ekuitas

Ekuitas Rp.47.911.165.920,-

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (audited) masing-masing adalah sebesar Rp.47.911.165.920,- dan Rp.48.472.958.255,- Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp.1.484.904,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.1.484.904,- dan Rp.1.732.388,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Semester 1 TA 2025 dan 31 Desember 2024 (audited)
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Gedung, Tanah dan Bangunan	1.484.904	1.732.388	(14,29)
Jumlah	**1.484.904**	**1.372.388**	

Saldo Pendapatan PNBP sebesar Rp.1.484.904,- merupakan pembayaran sewa rumah dinas bulan Januari-Juni 2025 melalui potongan SPM Belanja Pegawai (Gaji Induk) setiap bulannya.

Terdapat penurunan pendapatan PNBP terkait sewa rumah dinas dikarenakan pada bulan Juli 2025 tidak tersewa karena Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta promosi dan mutasi keluar.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.6.031.107.020,-

Jumlah Beban Pegawai pada Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.031.107.020,- dan Rp.5.523.058.074,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian beban pegawai per 30 Juni 2025 sebagai berikut :

URAIAN	TH 2024	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	*2.138.056.000*	*2.052.374.220*	*4,17*
Beban Tunjangan-tunjangan	*3.710.371.020*	*3.310.046.854*	*12,09*
Beban Uang Makan	*182.680.000*	*160.637.000*	*13,72*
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah Kotor	***6.031.107.020***	***5.523.058.074***	***9,20***
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	***6.031.107.020***	***5.523.058.074***	***9,20***

Beban Pegawai per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,20% dibandingkan dengan 30 Juni 2024. Hal ini dikarenakan :

1. Adanya kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 orang.
2. Adanya mutasi masuk pegawai yang tidak berimbang dengan mutasi keluarnya, sehingga pembebanan belanja pegawai pun menjadi bertambah.
3. Adanya SK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai sebanyak 7 orang, SK Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak 4 orang, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian sebanyak 2 orang dan SK Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 2 orang serta tambahan CPNS sebanyak 3 orang sehingga menyebabkan penambahan beban pegawai.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.7.964.450,-

Jumlah Beban Persediaan pada Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.7.964.450,- dan Rp.8.640.600,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	7.964.450	8.640.600	7,83
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	**7.964.450**	**8.640.600**	**7,83**

Beban persediaan pada Semester 1 Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,83% dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2024. Hal ini dikarenakan penggunaan persediaan barang konsumsi yang lebih banyak oleh para pegawai.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.435.818.429

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.435.818.429,- dan Rp. 457.576.147,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban keperluan Perkantoran	322.956.333	301.571.175	7,09
Beban Pengiriman Surat Dinas	16.500	163.000	(89,88)
Beban Honor Operasional Satker	24.925.000	25.200.000	(1,09)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	80.750	(100)
Beban Langganan Telpon	440.596	461.222	(4,47)
Beban Sewa	87.480.000	129.600.000	(32,22)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	500.000	(100)
Jumlah Beban	**435.818.429**	**457.576.147**	**(4,75)**

Beban barang dan jasa pada semester 1 Tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 4,75% dibandingkan semester 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan :

1. Berkurangnya pengiriman surat dinas via Pos dan penggunaan langganan telepon dikarenakan komunikasi Pengadilan Agama Yogyakarta sudah bersifat paperless dan lebih banyak menggunakan media sosial Pengadilan Agama Yogyakarta (Instagram, Facebook, Website) maupun chat melalui Aplikasi Whatsaap.
2. Berkurangnya beban sewa rumah dinas untuk hakim dikarenakan adanya Promosi dan Mutasi Keluar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga penggunaan sewa rumah dinas menjadi tidak maksimal.
3. Penurunan honor operasional satker dikarenakan dampak kebijakan pemberian honor tambahan kepada pengelola keuangan yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional yang tidak melebihi 40% SBM.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.269.953.007,-

Beban Pemeliharaan pada Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.269.953.007,- dan Rp.258.422.984,- . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.626.610	180.144.351	4,15
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.183.000	5.184.000	(0,02)
Beban Peralatan dan Mesin	73.429.422	69.306.133	5,95
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.713.975	3.788.500	(1,97)
Jumlah Beban	**269.953.007**	**258.422.984**	**4,46**

Beban pemeliharaan pada semester 1 Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 4,46% dibandingkan semester 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan :

1. Peningkatan beban pemeliharaan gedung dan bangunan dikarenakan realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dimaksimalkan pada Semester I ini.
2. Peningkatan beban peralatan dan mesin dikarenakan beberapa kendaraan yang mendadak harus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan diluar jadwal service rutinnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.4.631.080,-

Beban Perjalanan Dinas pasa Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.14.631.080,- dan Rp.15.102.100,-

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.631.080	15.102.100	(69,33)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Jumlah Beban	**4.631.080**	**15.102.100**	**(69,33)**

Beban Perjalanan Dinas pada semester 1 TA. 2025 mengalami mengalami penurunan sebesar 69,33 persen dibandingkan pada Semester I TA. 2025. Hal ini dikarenakan adanya pemblokiran 50% pagu anggaran untuk perjalanan dinas dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Pemblokiran tersebut sampai saat ini masih belum dapat dicairkan/ direalisasikan.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan

kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.175.799.493,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.175.799.493,- dan Rp.171.623.439,- .

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Semester 1 TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.219.294	91.949.037	3,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.580.199	79.674.402	1,12
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Jumlah Beban	**175.799.493**	**171.623.439**	**2,43**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada semester 1 TA. 2025 mengalami mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen dibandingkan pada TA. 2024. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada beban penyusutan peralatan dan mesin serta beban penyusutan gedung dan bangunan.

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

D.11. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional (Rp.8.201.120,-)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan Rp.0,- .

Rincian Kegiatan Non Operasinal
Semester 1 TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset	(8.201.200)	-	(100)
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional Lainnya	80	-	100
Jumlah Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional	**(8.201.120)**	**-**	**(100)**

Jumlah Defisit kegiatan non operasional meningkat dikarenakan adannya defisit pelepasan aset karena penghapusan melalui lelang dan adanya pengembalian belanja pegawai tahun 2024 karena kekurangan gaji.

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Semester 1 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp.48.472.985.255,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.48.472.985.255,- dan Rp.48.776.150.157,-

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO (Rp.6.931.989.695,-)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit Rp.6.931.989.695,- dan defisit Rp.6.432.690.956,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp.0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0,-.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0.-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.0,-

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pada Semester I 2025 tidak terjadi koreksi nilai terhadap aset.

E.4.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp.0,-

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.6.370.170.360,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.6.370.170.360,- dan Rp.45.657.555.193,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas
Semester 1 TA 2025

Uraian	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.122.984)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.315.287.344
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	58.006.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	**6.370.170.360**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (Rp.3.122.984.-) sedangkan DKEL sebesar Rp.6.370.170.360,-

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal

K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,- . Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,-

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.58.006.000,- .

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS Nomor : BA-35/KPN.1501/2025 tentang persetujuan Hibah Langsung bentuk barang berharga dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) No. 275/SEK.PA.W12-A1/PL1. 2.4/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dari PT Media Sarana Data senilai Rp.58.006.000,- berupa alat pengolah data dengan rincian :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
Mini PC (Personal Computer	1	2.405.000
PC (Personal Computer)	2	22.100.000
Tablet	3	17.355.000
Televisi	2	16.146.000
Total		**58.006.000**

E.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.47.911.165.920,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.47.911.165.920,- dan Rp.48.001.014.394,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 669/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 menunjuk :

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	: Taslim, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Verawati Widjaya, S.H.
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.
Bendahara Pengeluaran	: Arina Rahmaniar, S.Kom.
Bendahara Penerimaan	: Novialita Pitaloka, S.T.
Staf Pengelola Anggaran	: Zahra Fatimah Mu'min, S.Kom Catur Gunawan, SE

DAFTAR LAMPIRAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.is, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 527 /SEKPA.W12-A1/KU2.1/VII/2025 Yogyakarta, 21 Juli 2025
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Pengiriman Laporan Keuangan Semester I TA. 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

di Yogyakarta

Bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah periode Semester I Tahun Anggaran 2025 pada satker Pengadilan Agama Yogyakarta (401199 dan 401201).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Taslim, S.H

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (401199) Pengadilan Agama Yogyakarta
Kode dan Nama UAPPAW : (0400) DI Yogyakarta
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

	Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√	Tidak
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		N/A	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		N/A	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	**0**		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**0**		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		N/A	Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak

4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
	TELAAH LK BLU			
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,		N/A	Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan		N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Adanya Hibah Barang dari Korporate/ Perusahaan berupa 1 Unit Mini PC, 2 Unit PC, 3 Unit Tablet dan 2 Unit Televisi sehingga memunculkan akun 391131 Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp.58,006,000,-

Adanya Pelepasan Aset untuk barang-barang yang telah rusak berat sehingga memunculkan akun 596111 Beban Pelepasan Aset sebesar Rp. 9,839,200,-

Adanya Penghapusan BMN melalui mekanisme lelang oleh KPKNL untuk barang-barang yang dinyatakan rusak berat sehingga memunculkan akun 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1,638,000,-

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Muhammad Arief Jauhari, SAP
NIP. 197802272006041002

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Penelaah,

Novialita Pitaloka, S.T.
NIP. 198611262011012011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401199

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**2,970,000**	**3,122,984**	**152,984**	**105.15**	**2,970,000**	**1,484,904**	**(1,485,096)**	**50**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,970,000	3,122,984	152,984	105.15	2,970,000	1,484,904	(1,485,096)	50
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**2,970,000**	**3,122,984**	**152,984**	**105.15**	**2,970,000**	**1,484,904**	**(1,485,096)**	**50**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,820,613,000	6,315,287,344	(3,505,325,656)	64.31	9,660,808,000	5,649,290,097	(4,011,517,903)	58.48
1. Belanja Pegawai	8,310,178,000	5,431,853,789	(2,878,324,211)	65.36	8,374,621,000	4,934,213,223	(3,440,407,777)	58.92
2. Belanja Barang	1,309,935,000	682,945,015	(626,989,985)	52.14	1,286,187,000	715,076,874	(571,110,126)	55.6
3. Belanja Modal	200,500,000	200,488,540	(11,460)	99.99	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401199

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**9,820,613,000**	**6,315,287,344**	**(3,505,325,656)**	**64.31**	**9,660,808,000**	**5,649,290,097**	**(4,011,517,903)**	**58.48**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

TASLIM, SH
NIP 197001231995031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/25 9:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/25 8:46 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,094,672,000	2,321,840,000	1,904,031,000	0	1,904,031,000	82.01	417,809,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	45,000	24,297	323	23,974	53.28	21,026
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	178,955,000	205,599,000	131,922,130	0	131,922,130	64.16	73,676,870
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	98,097,000	58,097,000	33,407,858	0	33,407,858	57.5	24,689,142
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	36,000,000	18,720,000	0	18,720,000	52	17,280,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,709,662,000	147,170,000	88,706,000	0	88,706,000	60.27	58,464,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	555,290,000	21,158,000	19,664,893	0	19,664,893	92.94	1,493,107
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	119,723,000	119,723,000	80,820,720	0	80,820,720	67.51	38,902,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	492,904,000	492,904,000	182,680,000	0	182,680,000	37.06	310,224,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	20,510,000	26,960,000	0	26,960,000	131.45	(6,450,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	8,310,178,000	3,423,046,000	2,486,936,898	323	2,486,936,575	72.65	936,109,425
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	802,832,000	519,017,214	0	519,017,214	64.65	283,814,786
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	4,084,300,000	2,425,900,000	0	2,425,900,000	59.4	1,658,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	4,887,132,000	2,944,917,214	0	2,944,917,214	60.26	1,942,214,786
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,310,178,000	8,310,178,000	5,431,854,112	323	5,431,853,789	65.36	2,878,324,211
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	598,625,000	608,139,000	296,481,333	0	296,481,333	48.75	311,657,667
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	600,000	16,500	0	16,500	2.75	583,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,820,000	59,820,000	24,925,000	0	24,925,000	41.67	34,895,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	660,245,000	668,559,000	321,422,833	0	321,422,833	48.08	347,136,167
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,430,000	29,946,000	11,840,200	0	11,840,200	39.54	18,105,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	32,430,000	29,946,000	11,840,200	0	11,840,200	39.54	18,105,800
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	3,000,000	1,200,000	586,431	0	586,431	48.87	613,569
522141	Belanja Sewa	198,000,000	198,000,000	87,480,000	0	87,480,000	44.18	110,520,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/25 9:14 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/25 8:46 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	201,000,000	199,200,000	88,066,431	0	88,066,431	44.21	111,133,569
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213,800,000	213,800,000	187,056,610	0	187,056,610	87.49	26,743,390
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,184,000	5,184,000	5,183,000	0	5,183,000	99.98	1,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,676,000	174,646,000	64,744,861	0	64,744,861	37.07	109,901,139
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	397,660,000	393,630,000	256,984,471	0	256,984,471	65.29	136,645,529
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,600,000	17,600,000	4,631,080	0	4,631,080	26.31	12,968,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,600,000	17,600,000	4,631,080	0	4,631,080	26.31	12,968,920
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,309,935,000	1,309,935,000	682,945,015	0	682,945,015	52.14	626,989,985
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138,000,000	138,000,000	137,988,540	0	137,988,540	99.99	11,460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	138,000,000	138,000,000	137,988,540	0	137,988,540	99.99	11,460
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	62,500,000	62,500,000	62,500,000	0	62,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	62,500,000	62,500,000	62,500,000	0	62,500,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	200,500,000	200,500,000	200,488,540	0	200,488,540	99.99	11,460
	JUMLAH BELANJA	9,820,613,000	9,820,613,000	6,315,287,667	323	6,315,287,344	64.31	3,505,325,656

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/07/25 9:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000	0	1,638,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	742,452	0	742,452	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2,970,000	742,452	0	742,452	25
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	2,970,000	3,122,904	0	3,122,904	105.15
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80	0	80	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	80	0	80	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,970,000	3,122,984	0	3,122,984	105.15
	JUMLAH PENDAPATAN	2,970,000	3,122,984	0	3,122,984	105.15

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 401199**	**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Tgl. Cetak 21/07/2025 9:14 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,085,900	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,437,000	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,668,761,998	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,310,477,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,168,479	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,384,884,350
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,192,810,114
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	16,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	103,475,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	93,636,300
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	6,013,023
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	145,835
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	16,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	48,472,985,255
JUMLAH			**53,166,474,877**	**53,166,474,877**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Persediaan	12,684,675	12,522,900	161,775	1.29
JUMLAH ASET LANCAR	**32,684,675**	**12,522,900**	**20,161,775**	**161.00**
ASET TETAP				
Tanah	43,029,069,000	43,029,069,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,864,756,538	3,668,761,998	195,994,540	5.34
Gedung dan Bangunan	6,372,977,000	6,310,477,000	62,500,000	0.99
Aset Tetap Lainnya	26,168,479	26,168,479	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,753,493,957)	(4,577,694,464)	(175,799,493)	3.84
JUMLAH ASET TETAP	**48,539,477,060**	**48,456,782,013**	**82,695,047**	**0.17**
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	16,000,000	(16,000,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	0	103,475,500	(103,475,500)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(93,636,300)	93,636,300	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**25,839,200**	**(25,839,200)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**48,572,161,735**	**48,495,144,113**	**77,017,622**	**0.16**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	630,841,254	22,158,858	608,682,396	2,746.90
Utang Yang Belum Ditagihkan	10,154,561	0	10,154,561	0.00
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**660,995,815**	**22,158,858**	**638,836,957**	**2,882.99**
JUMLAH KEWAJIBAN	**660,995,815**	**22,158,858**	**638,836,957**	**2,882.99**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	47,911,165,920	48,472,985,255	(561,819,335)	(1.16)
JUMLAH EKUITAS	**47,911,165,920**	**48,472,985,255**	**(561,819,335)**	**(1.16)**
JUMLAH EKUITAS	**47,911,165,920**	**48,472,985,255**	**(561,819,335)**	**(1.16)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**48,572,161,735**	**48,495,144,113**	**77,017,622**	**0.16**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP. 197001231995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:14 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,959,450	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,725,225	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,864,756,538	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,372,977,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,168,479	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,480,103,644
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,273,390,313
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	605,266,254
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	25,575,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	10,154,561
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,315,287,344
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,122,984	0
0.0	391111	Ekuitas	0	48,472,985,255
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	58,006,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	742,452
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	742,452
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,138,056,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	26,769	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	147,569,530	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	37,390,626	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,060,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	95,679,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,638,250	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	90,742,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	182,680,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	30,645,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	566,319,585	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,702,300,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	322,956,333	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24,925,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	440,596	0
3.0	522141	Beban Sewa	87,480,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:14 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187,626,610	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,183,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73,429,422	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4,631,080	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95,219,294	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80,580,199	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,964,450	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,713,975	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	9,839,200	0
JUMLAH			**60,263,891,355**	**60,263,891,355**

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP 197001231995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:14 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,315,287,344
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,122,984	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	742,452
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	742,452
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,904,031,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,297	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	131,922,130	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,407,858	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,720,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	88,706,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,664,893	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80,820,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	182,680,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,960,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	519,017,214	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,425,900,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	296,481,333	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24,925,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,840,200	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	586,431	0
3.0	522141	Belanja Sewa	87,480,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187,056,610	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,183,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,744,861	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,631,080	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,988,540	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	62,500,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	323
JUMLAH			**6,318,410,651**	**6,318,410,651**

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



TASLIM, SH

197001231995031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,484,904	1,732,388	(247,484)	(14.286)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,484,904	1,732,388	(247,484)	(14.286)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,484,904	1,732,388	(247,484)	(14.286)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,031,107,020	5,523,058,074	508,048,946	9.199
Beban Persediaan	7,964,450	8,640,600	(676,150)	(7.825)
Beban Barang dan Jasa	435,818,429	457,576,147	(21,757,718)	(4.755)
Beban Pemeliharaan	269,953,007	258,422,984	11,530,023	4.462
Beban Perjalanan Dinas	4,631,080	15,102,100	(10,471,020)	(69.335)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	175,799,493	171,623,439	4,176,054	2.433
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,925,273,479	6,434,423,344	490,850,135	7.629
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,923,788,575)	(6,432,690,956)	(491,097,619)	7.634
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(8,201,200)	0	(8,201,200)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	1,638,000	0	1,638,000	
Beban Pelepasan Aset	9,839,200	0	9,839,200	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80	0	80	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80	0	80	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(8,201,120)	0	(8,201,120)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,931,989,695)	(6,432,690,956)	(499,298,739)	7.762
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,931,989,695)	(6,432,690,956)	(499,298,739)	7.762

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



TASLIM, SH

NIP 197001231995031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:13 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	48,472,985,255	48,776,150,157	(303,164,902)	(0.62)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,931,989,695)	(6,432,690,956)	(499,298,739)	7.76
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,370,170,360	5,657,555,193	712,615,167	12.6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(561,819,335)	(775,135,763)	213,316,428	(27.52)
EKUITAS AKHIR	47,911,165,920	48,001,014,394	(89,848,474)	(0.19)

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

YASLIM, SH
NIP 197001231995031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.401199/2025
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Tahun : 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
KPPN : (030) Yogyakarta
Satuan Kerja : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 13.030.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00181/KW/401199/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	20.000.000,00	77.575.551,00	84.545.551,00	13.030.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	20.000.000,00	77.575.551,00	84.545.551,00	13.030.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	20.000.000,00	73.075.551,00	80.045.551,00	13.030.000,00
	1. BP UP*)	20.000.000,00	46.673.932,00	53.643.932,00	13.030.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	6.540.950,00	6.540.950,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.724.669,00	2.724.669,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 6.970.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	1.908.100,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	11.121.933,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	13.030.033,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	13.030.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	13.030.033,00
3. Selisih Kas	Rp.	(33,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	13.030.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	6.970.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : (33,00) karena tidak ada uang kecil satuan rupiah
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH
NIP 197001231995031001

KAB. BANTUL, Juni 2025
Bendahara Pengeluaran

ARINA RAHMANIAR, S.KOM
NIP. 198904202011012010

Dicetak pada tanggal 01 Jul 2025

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653244011991000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 13.030.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00181/KW/401199/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A.	Saldo Kas Bendahara		
1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	13.030.000,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	13.030.000,00
B.	Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :		
1	Saldo BP UP	Rp.	13.030.000,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	13.030.000,00
C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A.	Kas yang dikuasai bendahara		
1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	1.908.100,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	11.121.933,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	13.030.033,00
B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	(33,00)

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A.	Pembukuan menurut Bendahara		
1	a. Saldo UP	Rp.	13.030.000,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	6.970.000,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	20.000.000,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	20.000.000,00
B.	Pembukuan menurut UAKPA		
1	Kas UP di Bendahara	Rp.	20.000.000,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	20.000.000,00
C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

(33,00) karena tidak ada uang kecil satuan rupiah

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0.00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

ARINA RAHMANIAR, S.KOM
NIP. 198904202011012010

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH
NIP 197001231995031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 401199

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65324401199100 0	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 01	BRI Cabang Yogyakarta Katamso	20	S-2732/WPB.12/KP. 06/2020	16-10-2020	2025-06-25	11,121,933.00

BENDAHARA PENGELUARAN

ARINA RAHMANIAR, S.KOM

NIP. 198904202011012010

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

Satuan Kerja : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA40119900-

No Rekening : 653244011991000

Nama Rekening : BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 01

Nama Bank : BRI Cabang Yogyakarta Katamso

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			18.187.858,00
02-06-2025	FPK-PENG-BGiYH5nKDUXFA7u	Gaji 13 an. Cacan Wijaya	6.087.900,00	0,00	24.275.758,00
05-06-2025	00001/KWTI/401199/2025	Gaji 13 an. Cacan Wijaya dikarenakan SKPP telah terbit	0,00	6.087.900,00	18.187.858,00
10-06-2025	00062/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	217.500,00	0,00	18.405.358,00
10-06-2025	00061/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	170.250,00	0,00	18.575.608,00
10-06-2025	00060/BP/401199/2025	pungut pajak pph 23	32.000,00	0,00	18.607.608,00
10-06-2025	00063/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	30.000,00	0,00	18.637.608,00
10-06-2025	00064/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	26.000,00	0,00	18.663.608,00
10-06-2025	00065/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	25.000,00	0,00	18.688.608,00
10-06-2025	00067/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	19.500,00	0,00	18.708.108,00
10-06-2025	00066/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	19.500,00	0,00	18.727.608,00
10-06-2025	FPK-PENG-4Igzf1C7pvoHqAz	[DARI TUNAI] PU Bank via ATM	0,00	2.000.000,00	16.727.608,00
10-06-2025	00157/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan AC berupa servis AC	0,00	1.600.000,00	15.127.608,00

1	2	3	4	5	6
		Ruang PTSP sebanyak 2 unit			
10-06-2025	00163/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPK) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	1.450.000,00	13.677.608,00
10-06-2025	00162/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (KPA) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	1.135.000,00	12.542.608,00
10-06-2025	00164/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPSPM) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	600.000,00	11.942.608,00
10-06-2025	00165/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Bendahara Pengeluaran) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	520.000,00	11.422.608,00
10-06-2025	00166/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Pengelola PNBP) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	500.000,00	10.922.608,00
10-06-2025	00168/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 02-05-2025	0,00	390.000,00	10.532.608,00
10-06-2025	00167/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan Mei 2025 berdasarkan SK KPA No. 294/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/V/2025	0,00	390.000,00	10.142.608,00

1	2	3	4	5	6
		tanggal 02-05-2025			
10-06-2025	00156/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan AB 28 A berupa pembelian bensin tanggal 02-06-2025	0,00	312.543,00	9.830.065,00
10-06-2025	00058/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	217.500,00	9.612.565,00
10-06-2025	00161/KW/401199/2025	Biaya perjalanan dinas an. Taslim, S.H dalam acara Pembinaan dan Penyerahan Reward Pengadilan Agama berkinerja terbaik TW 1 Th 2025 tanggal 19 Mei 2025 di PTA Yogyakarta	0,00	200.000,00	9.412.565,00
10-06-2025	00158/KW/401199/2025	Biaya perjalanan dinas an. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H dalam acara Pembinaan dan Penyerahan Reward Pengadilan Agama berkinerja terbaik TW 1 Th 2025 tanggal 19 Mei 2025 di PTA Yogyakarta	0,00	200.000,00	9.212.565,00
10-06-2025	00159/KW/401199/2025	Biaya perjalanan dinas an. A. Syarkawi, S.Ag., M.H dalam acara Pembinaan dan Penyerahan Reward Pengadilan Agama berkinerja terbaik TW 1 Th 2025 tanggal 19 Mei 2025 di PTA Yogyakarta	0,00	200.000,00	9.012.565,00
10-06-2025	00160/KW/401199/2025	Biaya perjalanan dinas an. Drs. Abdul Adhim AT dalam acara Pembinaan dan Penyerahan Reward Pengadilan Agama berkinerja terbaik TW 1 Th 2025 tanggal 19 Mei 2025 di PTA Yogyakarta	0,00	200.000,00	8.812.565,00
10-06-2025	00057/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	170.250,00	8.642.315,00
10-06-2025	00056/SSP/401199/2025	setor pph 23	0,00	32.000,00	8.610.315,00
10-06-2025	00059/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	30.000,00	8.580.315,00
10-06-2025	00060/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	26.000,00	8.554.315,00
10-06-2025	00061/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	25.000,00	8.529.315,00

1	2	3	4	5	6
10-06-2025	00063/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	19.500,00	8.509.815,00
10-06-2025	00062/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	19.500,00	8.490.315,00
11-06-2025	FPK-PENG-RzUr9AIEGJImZtl	GUP KKP VII JUNI	3.905.856,00	0,00	12.396.171,00
11-06-2025	FPK-PENG-XsVK9OFygpLwMBZ	LS BEND II Uang Makan Mei an. Bahran	453.050,00	0,00	12.849.221,00
13-06-2025	FPK-PENG-8QtyUFPDyJbnLqb	Pembayaran Tagihan KKP atas SPM GUP KKP VII JUNI	0,00	3.905.856,00	8.943.365,00
13-06-2025	00002/KWTI/401199/2025	Uang Makan bulan Mei 2025 pensiun 1 Juni 2025	0,00	453.050,00	8.490.315,00
18-06-2025	FPK-PENG-WWgANde2wk1LmLx	Terima Transport Hakim Mei 2025	8.008.000,00	0,00	16.498.315,00
20-06-2025	FPK-PENG-twCxka8dPRDHoj3	GUP KKP VIII JUNI	17.994.458,00	0,00	34.492.773,00
20-06-2025	FPK-PENG-8RrPEmyVwlbbN1T	GUP TUNAI VIII JUNI	10.820.618,00	0,00	45.313.391,00
23-06-2025	FPK-PENG-jbPrkPqt0H73YmR	Transfer Uang Transportasi Hakim Mei 2025	0,00	8.008.000,00	37.305.391,00
24-06-2025	FPK-PENG-fnrdA2jb2ZWGVM2	GUP TUNAI IX JUNI	13.953.000,00	0,00	51.258.391,00
24-06-2025	FPK-PENG-q9b6DbHEovBydDL	Terima Transport Hakim Desember 2024	9.128.000,00	0,00	60.386.391,00
24-06-2025	00068/BP/401199/2025	pungut ppn dan pph 23	1.377.619,00	0,00	61.764.010,00
24-06-2025	00070/BP/401199/2025	pungut ppn dan pph 23	732.300,00	0,00	62.496.310,00
24-06-2025	00069/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21	48.750,00	0,00	62.545.060,00
24-06-2025	FPK-PENG-Vk0Ehu6dnZSsfpQ	Pembayaran Tagihan KKP atas SPM GUP KKP VIII JUNI	0,00	17.994.458,00	44.550.602,00
24-06-2025	00175/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan AC berupa relokasi, cleaning, dan penambahan freon (rincian terlampir)	0,00	11.567.000,00	32.983.602,00
24-06-2025	00177/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan PC dan laptop berupa servis lcd, cleaning, perbaikan keyboard, speaker, SSD dan charger (rincian terlampir)	0,00	5.325.000,00	27.658.602,00

1	2	3	4	5	6
24-06-2025	00176/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan mobil dinas AB 1403 UH berupa penggantian laker roda belakang	0,00	1.950.000,00	25.708.602,00
24-06-2025	00064/SSP/401199/2025	setor ppn dan pph 23	0,00	1.377.619,00	24.330.983,00
24-06-2025	00066/SSP/401199/2025	setor ppn dan pph 23	0,00	732.300,00	23.598.683,00
24-06-2025	00174/KW/401199/2025	Biaya perjalanan dinas an. Taslim, S.H. dalam acara Rapat Koordinasi Kesekretariatan PTA dan PA se-DIY tanggal 11-06-2025 di PTA Yogyakarta	0,00	200.000,00	23.398.683,00
24-06-2025	00065/SSP/401199/2025	setor pph 21	0,00	48.750,00	23.349.933,00
25-06-2025	00071/BP/401199/2025	pungut pajak pph 23	12.000,00	0,00	23.361.933,00
25-06-2025	FPK-PENG-vxTAkrwri4zXxAt	Transfer Uang Transportasi Hakim Desember 2024	0,00	9.128.000,00	14.233.933,00
25-06-2025	FPK-PENG-W9eG9wh7L29XI4J	[DARI TUNAI] PU Bank via ATM	0,00	2.500.000,00	11.733.933,00
25-06-2025	00179/KW/401199/2025	Biaya keperluan perkantoran berupa pembayaran jasa angkut sampah bulan Mei dan Juni 2025	0,00	600.000,00	11.133.933,00
25-06-2025	00067/SSP/401199/2025	setor pph 23	0,00	12.000,00	11.121.933,00
		Jumlah	**73.061.301,00**	**80.127.226,00**	**11.121.933,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



ARINA RAHMANIAR, S.KOM

NIP. 198904202011012010

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

Satuan Kerja : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.401199/2025

Tahun Anggaran : 2025

KPPN : (030) Yogyakarta

Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	247.484,00
3.	Selisih	Rp	- 247.484,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 247.484,00 karena Adanya PNBP berupa potongan SPM belanja pegawai untuk pembayaran sewa rumah dinas bulan Juni 2025

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH

NIP 197001231995031001

KAB. BANTUL , 30 Juni 2025

Bendahara Penerimaan

NOVIALITA PITALOKA, ST.

NIP 198611262011012011

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A.	Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0,00
B.	Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0,00
	2. BP DPK	Rp.	0,00
	3. BP Pajak	Rp.	0,00
	4. BP Lainnya	Rp.	0,00
	5. Jumlah	Rp.	0,00
C.	Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

I. Hasil Pemeriksaan Kas

A.	Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B.	Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

II. Hasil Rekonsiliasi Internal

A.	Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B	Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	247.484,00
C	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 247.484,00

V. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena -

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena Adanya PNBP berupa potongan SPM belanja pegawai untuk pembayaran sewa rumah dinas bulan Juni 2025

Bendahara Penerimaan

NOVIALITA PITALOKA, ST.

NIP. 198611262011012011

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH

NIP 197001231995031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 401199 (PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO

Bendahara Penerimaan,

NOVIALITA PITALOKA, ST.

NIP. 198611262011012011

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
Nomor : 413 /SEKPA.W12-A1/PL1.2.5/VI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima telah dilaksanakan Stock Opname barang persediaan di Gudang persediaan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta (401199) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Nominal	
1.	Barang Konsumsi	: Rp.	9.959.450
2.	Amunisi	: Rp.	-
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	: Rp.	2.725.225
4.	Suku Cadang	: Rp.	-
5.	Persediaan untuk Tujuan strategis/ berjaga-jaga	: Rp.	-
6.	Pita Cukai dan Leges	: Rp.	-
7.	Bahan Baku	: Rp.	-
8.	Barang dalam proses/ setengah jadi	: Rp.	-
9.	Tanah/ bangunan untuk dijual	: Rp.	-
10.	Hewan dan Tanaman untuk dijual	: Rp.	-

Sesuai hasil perhitungan, diketahui bahwa posisi barang persediaan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta per tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 adalah sebesar total Rp. 12.684.675,- (*Dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stock Opname dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian jumlah barang pada laporan rincian persediaan per bulan Juni tahun 2025 dengan kartu stock barang dan jumlah fisik barang persediaan;
2. Dari hasil stock opname tersebut diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah barang antara jumlah fisik Barang Persediaan yang tercatat pada Kartu Stock Barang, maupun jumlah pada catatan di Aplikasi Sakti Modul Persediaan.
3. Barang Persediaan yang kondisinya sudah rusak/ usang akan dihapuskan dari pencatatan pada tahun 2025.

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Mengetahui, Kuasa Pengguna Barang	Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan	Operator Persediaan
Taslim, SH	Muhammad Arief Jauhari, S.AP	Catur Gunawan, S.E.
NIP. 19700123.199503.1.001	NIP. 19780227.200604.1.002	NIP. 19800826.200212.1.001

Lampiran Berita Acara Opname Fisik Persediaan Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 413 /SEKPA.W12-A1/PL1.2.5/VI/2025

BERITA ACARA PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) BARANG
Per : 30 Juni 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Opname Fisik barang persediaan pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta (401199) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1010301001000001	Bolp. Meja Debozz 3001	1	1	0	Baik	13.500
2.	1010301001000002	Bolpoin Snowman BP V5 (Black)	4	4	0	Baik	12.800
3.	1010301001000003	Spidol Snowman Jumbo	5	5	0	Baik	107.500
4.	1010301001000005	bolpoin BP TG-340 (blue) tizo	19	19	0	Baik	85.500
5.	1010301001000007	bolpoin BP TG-340 (black) tizo	20	20	0	Baik	90.000
6.	1010301001000011	Isi Pentel Hitam	11	11	0	Baik	253.000
7.	1010301001000012	bp sahara 0.5 dots kenko	6	6	0	Baik	21.000
8.	1010301001000016	Bolpoin Standard AE-7	19	19	0	Baik	43.700
9.	1010301001000033	Isi Pentel Biru	10	10	0	Baik	225.000
10.	1010301001000039	Pensil Faber Castle	7	7	0	Baik	28.000
11.	1010301001000049	Boxy Balliner Biru	3	3	0	Baik	50.400
12.	1010301001000052	Boxy Balliner Hitam	16	16	0	Baik	285.600
13.	1010301001000053	Bolpoin Kokoro	11	11	0	Baik	66.000
14.	1010301003000001	Binder Clip 200 41mm	44	44	0	Baik	50.800
15.	1010301003000002	Clip Seagul No. 3 (Trigonal)	12	12	0	Baik	42.000
16.	1010301003000013	Binder Clips 111	2	2	0	Baik	1.000
17.	1010301003000023	Binder Clips 260	24	24	0	Baik	37.200
18.	1010301003000024	Binder Clips 105	48	48	0	Baik	12.000
19.	1010301004000001	Penghapus Steadler Kecil	2	2	0	Baik	6.000

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	1010301004000002	Tipe-X Kenko	2	2	0	Baik	10.000
21.	1010301005000006	Buku Folio 100 Lembar	5	5	0	Baik	100.000
22.	1010301005000007	Buku Ekspedisi 100 Lembar	7	7	0	Baik	94.500
23.	1010301005000008	Buku Kwarto 100 Lembar	5	5	0	Baik	47.500
24.	1010301006000001	Stopmap Kertas	39	39	0	Baik	25.350
25.	1010301006000007	Ordner1465 10 (black) F4 bantex	3	3	0	Baik	120.000
26.	1010301006000013	Box File Maspion	6	6	0	Baik	198.000
27.	1010301006000032	Business File Inter X	120	120	0	Baik	528.000
28.	1010301006000047	Map Jepit Seagul	24	24	0	Baik	290.400
29.	1010301008000001	Cutter Kenko L500/240	3	3	0	Baik	42.000
30.	1010301008000002	Refill cutter kenko	3	3	0	Baik	18.900
31.	1010301010000004	DB Tape 2"Nachi/40	3	3	0	Baik	34.500
32.	1010301010000007	DB Side Tape 24mm	5	5	0	Baik	27.500
33.	1010301010000008	Lakban OPP 48/90/100yd (Clear)Nachi	1	1	0	Baik	14.500
34.	1010301010000009	Isolasi 24x72 Nachi Tanggung Bening	5	5	0	Baik	32.500
35.	1010301010000010	Lem Uhu Stick	5	5	0	Baik	110.000
36.	1010301010000024	Lakban Daimaru 2 48x12 60	5	5	0	Baik	105.000
37.	1010301010000026	Double Tape Foam 24mm Nachi	8	8	0	Baik	84.000
38.	1010301011000007	Gunting Tanggung	7	7	0	Baik	56.000
39.	1010301011000008	staples 3-1m japan max	4	4	0	Baik	26.000
40.	1010301011000033	Stapler SDI 1102	3	3	0	Baik	52.500
41.	1010301011000036	Isi Max K 800	22	22	0	Baik	79.000
42.	1010301011000037	Stapler Max HD 50 50	6	6	0	Baik	455.000
43.	1010301013000001	ISI GW K/10/1000 (Isi Staples Kecil)	14	14	0	Baik	61.600
44.	1010301013000002	Staples 23/10 Etona	5	5	0	Baik	55.000

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		(isi stapler) tanggung					
45.	1010302001000001	Kertas F4 70 SD	27	27	0	Baik	1.579.000
46.	1010302001000006	Kertas F4 Warna	2	2	0	Baik	162.500
47.	1010302001000008	Kertas A4 70 SD	33	33	0	Baik	1.732.500
48.	1010302002000003	Post it PSN-15 Page Maker 5W Pronto	4	4	0	Baik	44.000
49.	1010302002000005	Reffil Tissu Multi	4	4	0	Baik	204.000
50.	1010302002000006	Tissu Roll Multi	8	8	0	Baik	28.000
51.	1010302002000008	Kertas Sertifikat Putih A4 (concorde paper)	4	4	0	Baik	70.000
52.	1010302004000001	Amplop Kecil (KN)	1	1	0	Baik	8.700
53.	1010302004000002	Amplop Tanggung	1	1	0	Baik	23.000
54.	1010304010000004	Mouse USB Logitech	8	8	0	Baik	1.160.000
55.	1010304999000002	Mouse Pad	1	1	0	Baik	5.000
56.	1010305001000002	Sapu Ijuk Super	1	1	0	Baik	90.000
57.	1010305001000003	Sulak Bulu	6	6	0	Baik	203.000
58.	1010305001000004	Sikat WC	5	5	0	Baik	120.000
59.	1010305001000005	Sikat Pakaian	1	1	0	Baik	11.500
60.	1010305008000003	Wipol Karbol	9	9	0	Baik	288.000
61.	1010305008000004	Rinso 900	1	1	0	Baik	38.500
62.	1010305008000006	Polytex Sabut	1	1	0	Baik	3.000
63.	1010305008000009	Refill Hand Soap 375ml Yuri	19	19	0	Baik	418.000
64.	1010305008000011	Sunlight Lime 650ml	9	9	0	Baik	153.000
65.	1010305008000016	Vixal Blue Botol	14	14	0	Baik	280.000
66.	1010305008000031	Cling Fresh Pembersih Kaca	13	13	0	Baik	130.000
67.	1010305012000008	Obat Pembersih Lantai	27	27	0	Baik	459.000
68.	1010305012000012	Stella Gantung	17	17	0	Baik	126.225
69.	1010305012000013	Dahlia Kapur Barus Bal5 Refill	15	15	0	Baik	405.000
70.	1010306010000002	Batu Baterai Alkaline AA LR-06	20	20	0	Baik	300.000
71.	1010306010000003	Batu Baterai R20 ABC Besar Senter	5	5	0	Baik	37.500

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	1010306010000006	Batu Baterai Alkaline AAA	26	26	0	Baik	364.000
73.	1010314999000001	Baygon 600ml	3	3	0	Baik	142.500
						Total	**12.684.675**

Petugas Opname Barang :

TTD

1. Muhammad Arief Jauhari, S.AP .....
2. Catur Gunawan, S.E. .....

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**Mahkamah Agung RI**
Eselon I	:	**Badan Urusan Administrasi**
Wilayah	:	**DI Yogyakarta**
Satuan Kerja	:	**Pengadilan Agama Yogyakarta**
No. Dokumen	:	**001**
Tanggal	:	**02/01/2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Balik Langganan Telepon Desember 2024**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[X]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	K	522112 - Beban langganan telepon		145.835
	D	212112 - Beban barang yang masih harus dibayar	145.835	
2	K			
	D			
3	K			
	D			

Uraian :

Jurnal Balik atas Tagihan Telepon pemakaian bulan Desember 2024

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Petugas Komputer
Muhammad Arief Jauhari, SAP	*Taslim, SH*	*Novialita Pitaloka, ST*
Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 250301301000163

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	250301301000163	10-01-2025	17-01-2025	145,835	00004T/401199/2025	10-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 2 invoice	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 15-01-25 10:53:19 oleh : 401199

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00004A | Tanggal 10-Jan-2025 | Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 145.835,00

**** SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-005.01.2.401199/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 17-Jan-2025 Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401199.030.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	145.835,00
Jumlah Pengeluaran	145.835,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	145.835,00

Kepada:

Nomor	: 2536	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening	: 120101000014303
NPWP1	: 0010000131093000	Nama Pemilik	: PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
NPWP2	: 0000985846541000	Alamat	: JL. KEBUN SIRIH NO. 12
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 2 invoice		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kota Yogyakarta, 10 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**Mahkamah Agung RI**
Eselon I	:	**Badan Urusan Administrasi**
Wilayah	:	**DI Yogyakarta**
Satuan Kerja	:	**Pengadilan Agama Yogyakarta**
No. Dokumen	:	**001**
Tanggal	:	**02/01/2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Balik Langganan Internet Desember 2024**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[X]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	K	218111 - Utang yang belum diterima tagihannya		16.000.000
	D	212191 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	16.000.000	
2	K			
	D			
3	K			
	D			

Uraian :

Jurnal Balik atas Tagihan Layanan Internet pemakaian bulan Desember 2024 menggunakan mekanisme RPATA

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Petugas Komputer
Muhammad Arief Jauhari, SAP	*Taslim, SH*	*Novialita Pitaloka, ST*
Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 259991302001032

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259991302001032	03-01-2025	03-01-2025	14,126,126	00003T/401199/2025	02-01-2025	PEMBAYARAN RPATA	NON GAJI	Pembayaran Langganan Internet satuan kerja Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai BAST Nomor 667/SEKPA.W12-A1/PL1.1.6/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 06-01-25 15:21:15 oleh : 401199

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00003A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 14.126.126,00

****** EMPAT BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401199/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/030.24000025/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 28-12-2023 Nomor Kontrak/SPK : 3099/SEKPA.W12-A1/PL1.1.6/XII/2023	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401199.030.825619.0050100.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	16.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	16.000.000,00
POTONGAN	**JUMLAH UANG**
119525.030.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0451.2.000000.000000	288.288,00
119525.030.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0451.2.000000.000000	1.585.586,00
Jumlah Potongan	1.873.874,00
TOTAL PEMBAYARAN	14.126.126,00

Kepada:

Nomor	: 117291	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT MEDIA SARANA DATA	Rekening	: 1370007686823
NPWP1	: 0029514732541000	Nama Pemilik	: PT MEDIA SARANA DATA
NPWP2	: 0000985846541000	Alamat	: Jl Daradasih No 11 A Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta 55251
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Langganan Internet satuan kerja Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai BAST Nomor 667/SEKPA.W12-A1/PL1.1.6/XII/2024 Tanggal 31-12-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kota Yogyakarta, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**Mahkamah Agung RI**
Eselon I	:	**Badan Urusan Administrasi**
Wilayah	:	**DI Yogyakarta**
Satuan Kerja	:	**Pengadilan Agama Yogyakarta**
No. Dokumen	:	**002, 003, 004, 005, 006 dan 007**
Tanggal	:	**02/01/2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Balik Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[X]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	K	511111 - Belanja Gaji Pokok PNS	-	752.400
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	752.400	-
2	K	511121 - Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	-	75.240
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	75.240	-
3	K	511122 - Belanja Tunj. Anak PNS	-	10.032
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di	10.032	-
4	K	511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	3.900.000
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di	3.900.000	-
5	K	511125 - Belanja Tunj. PPh PNS	-	1.257.343
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di	1.257.343	-
6	K	511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	8
	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di	8	-

Uraian :
Jurnal Balik atas Kekurangan Gaji Terusan bulan Oktober s.d Desember 2024

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Petugas Komputer
Muhammad Arief Jauhari, SAP	*Taslim, SH*	*Novialita Pitaloka, ST*
Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025	Tanggal : 2 Januari 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 250301301001000

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	250301301001000	17-02-2025	17-02-2025	4,737,600	00026T/401199/2025	14-02-2025	KEKURANGAN GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Terusan ke 1-3 an. Satrianih Bulan Oktober - Desember 2024	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 28-07-25 16:33:26 oleh : 401199

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00026A | Tanggal 14-Feb-2025 |

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.737.600,00

**** EMPAT JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401199/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401199.030.511111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	752.400,00
401199.030.511119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	8,00
401199.030.511121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	75.240,00
401199.030.511122.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	10.032,00
401199.030.511324.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	1.275.343,00
401199.030.511339.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	3.900.000,00
Jumlah Pengeluaran	6.013.023,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
119525.030.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	1.275.343,00
401199.030.425911.0050100.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	80,00
Jumlah Potongan	1.275.423,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.737.600,00

Kepada:

Nomor	: 836726	Bank / Pos	: TERLAMPIR
Nama Supplier	: PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	Rekening	: TERLAMPIR
NPWP1	: 0000985846541000	Nama Pemilik	: TERLAMPIR
NPWP2	: 0000985846541000	Uraian	: Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Terusan ke 1-3 an. Satrianih Bulan Oktober - Desember 2024
NOP	:		
ALAMAT	: Jl. Ipda Tut Harsono No. 53		

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kota Yogyakarta, 14 Februari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00026A | Tanggal : 14-Feb-2025 |

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	DRA. SATRIANIH 022101021136501 7314077112630020	4.737.600,00	BANK RAKYAT INDONESIA SATRIANIH.DRA
JUMLAH		4.737.600,00	

Kota Yogyakarta, 14 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO.11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 542011, FAKS. (0274) 554634 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id

BERITA ACARA
PENGESAHAN MPHLBJS
NOMOR: BA-35/KPN.1501/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, sesuai dengan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 24-04-2024 Nomor 823290541998348529 telah dilakukan pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah pada ledger akrual SPAN dengan rincian sebagai berikut :

NIP User : 198312082003122001
Jenis Modul : SPAN General Ledger
Buku Besar : Akrual
Kategori : Penyesuaian
Periode : April 2025
Tanggal Akuntansi : 24-04-2025

Rincian

No	Akun	Deskripsi Akun	Kode Satker	Total Nilai	
				Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	132111	Peralatan dan mesin	050.01.401199	58.006.000,-	-
2	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	999.02.977263	-	58.006.000,-

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

User Pembuat Jurnal

Ditandatangani secara elektronik
Meliyana

Kepala Seksi Vera

Ditandatangani secara elektronik
Endang Zainatun

Mengetahui,
Kepala KPPN Yogyakarta

Ditandatangani secara elektronik
Arvi Risnawati

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT BERHARGA

Nomor	:	00076T	KPPN	:	030 - YOGYAKARTA
Tanggal	:	24-04-2025	Tanggal	:	24-04-2025
Satker	:	401199 - PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	Nomor	:	823290541998348529
			Tahun Anggaran	:	2025

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	58.006.000
Belanja	: Rp	58.006.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Barang TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor 256/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 tanggal 15-04-2025

Yogyakarta, 24-04-2025
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ditandatangani secara elektronik
Endang Zainatun

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL-BJS)
NOMOR : 275 /SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025
TANGGAL : 22 APRIL 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
Jalan Kusumanegara Nomor 11
Yogyakarta

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/jasa/surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Esselon 1	: 005/ Mahkamah Agung R.I
Kode dan Nama Satuan Kerja	: 401199/ Pengadilan Agama Yogyakarta

Pemberi Hibah

Negara Donor	: Indonesia
Nama Donor	: PT Media Sarana Data
Nama Proyek	: Hibah Langsung Barang dari PT Media Sarana Data untuk Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor dan Tanggal Perjanjian Hibah	: 256/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 Tanggal : 14 April 2025
Nilai Hibah	: Rp 58.006.000 (*Lima puluh delapan juta enam ribu rupiah*)

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register	: 2XKA9L7A
Nilai Realisasi Hibah	: Rp 58.006.000 (*Lima puluh delapan juta enam ribu rupiah*)
Bentuk Hibah	: Barang
Akun	: 431121

TELAH DISAHKAN
an. Kepala KPPN Yogyakarta
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
KANWIL DJPB PROVINSI DIY
Endang Zainatun
NIP. 19710103 199703 2 001

Yogyakarta, 22 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Yogyakarta

Taslim, S.H.
NIP. 19700123 199503 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1148/SEK/SK.PL1.2.3/IV/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/ KEKAYAAN NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan yang sudah rusak berat dan tidak bisa dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana surat Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 357/SEK.PTA.W12-A/PL1.2.3/IV/2025 tanggal 14 April 2025;

b. Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu menghapuskan Selain Tanah Dan/Atau Bangunan tersebut pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari Daftar Inventaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014...

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
13. Nota Kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2005, MA/SEK/167/SK/IX/2005 tentang Serah Terima Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama Untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan Atas Permohonan

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara;

15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516/SEK/PL1.2/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
16. Salinan Risalah Lelang Nomor 60/09.05/2025-01 tanggal 13 Maret 2025 dengan harga penawaran tertinggi Selain Tanah Dan/Atau Bangunan terjual sebesar Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
17. Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/SEK.PA.W12-A1/ PL.1.2/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.

KESATU : Menghapus dan/atau mengeluarkan barang milik negara sebagaimana termuat pada lampiran keputusan ini dari Daftar Inventaris Pengadilan Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak keputusan ini ditetapkan;

KEDUA : Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta wajib mengirimkan:

1. Laporan pelaksanaan penghapusan barang milik negara kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan melampirkan Surat Keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani.
2. Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang di hapus, dilaporkan sebagai mutasi pengurangan aset kepada Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melampirkan Register Transaksi Harian (RTH) Penghapusan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 24 April 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta untuk dilaksanakan/ dilaporkan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 1148/SEK/SK.PL1.2.3/IV/2025
Tanggal : 24 April 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KODE BARANG	N U P	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (RP)	NILAI LIMIT (RP)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mesin Antrian	Custom	3050105080	2	2021	1	27.496.000	838.000	Rusak Berat
2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC Back-UPS	3060101048	3	2019	1	2.534.000		Rusak Berat
3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC Back-UPS	3060101048	4	2019	1	2.534.000		Rusak Berat
4	Kursi Besi/Metal	Donati	3050201003	216	2010	1	577.500		Rusak Berat
5	Lemari Kayu		3050104002	10	1999	1	14.000		Rusak Berat
6	Televisi	Sharp 32 A 37	3050206002	2	2010	1	5.170.000		Rusak Berat
7	Televisi	LG 21 FU G	3050206002	3	2010	1	1.430.000		Rusak Berat
8	Televisi	Samsung	3050206002	12	2021	1	21.700.000		Rusak Berat
9	P.C Unit	ASUS Desktop M32CD-KID002T	3100102001	26	2017	1	10.150.000		Rusak Berat
10	P.C Unit	ASUS Desktop M32CD-KID002T	3100102001	27	2017	1	10.150.000		Rusak Berat

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KODE BARANG	N U P	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (RP)	NILAI LIMIT (RP)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P.C Unit	ASUS Desktop M32CD-KID002T	3100102001	28	2017	1	10.150.000		Rusak Berat
12	P.C Unit		3100102001	20	2016	1	11.570.000		Rusak Berat
JUMLAH						12	103.475.500	838.000	

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR	:	60/09.05/2025-01
TANGGAL	:	13 MARET 2025
PEJABAT LELANG	:	SUTARI EMA YARSI
PENJUAL	:	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: ----------

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: ----------

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; ----------

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; ----------

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ----------

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: ----------

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; ----------

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; ----------

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ----------

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: ----------

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. ----------
2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. ----------

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: --------

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. ----------
2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. ----------
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ----------

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. ----------
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. ----------
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ----------

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. ----------

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ----------

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. ----------
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. ----------

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melaui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli ----------

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ---------
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: --------

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ---------
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. ----------

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. ----------

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. ----------
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ----------
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ----------
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ----------
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. ----------
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. ----------
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. ----------
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. ----------
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. ----------
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. ----------
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. ----------
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. ----------
-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. ----------

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. ----------

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta. ----------

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. ----------

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. ----------

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. ----------

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. ----------

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. ----------

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: ----------

Barang yang laku/terjual: ----------

Satu paket inventaris terdiri dari satu unit lemari kayu, satu unit mesin antrian, satu unit kursi besi/metal, tiga unit televisi, dua unit uninterruptible power suppy (UPS), dan empat unit P.C unit. ----------

Harga Lelang ---------- : Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ---------- ribu rupiah) ----------

Pembeli ---------- : Heru Cahyono, NIK 3308203008790001, Buruh Harian ---------- Lepas, beralamat di Dusun Margo Agung RT/RW. 017/006, ---------- Kelurahan/Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten ---------- Magelang, Provinsi Jawa Tengah ----------

---

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 60/09.05/2025-01 tanggal 13 Maret 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) ----------
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) ----------
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ----------
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) ----------
Jumlah harga barang yang ditahan: ----------
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 12 (dua belas) ----------
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. ----------

Penjual	Pejabat Lelang
Ttd.	Ttd.
Taslim, S.H.	Sutari Ema Yarsi, S.E. NIP 19900301 201502 2 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 19 MAR 2025
Kepala KPKNL Yogyakarta

Tuti Kurniyaningsih P
NIP 19750923 199503 2 001